

IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN PADA TINGKAT KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Donny Saputra* & Wahyu Hidayat Riyanto

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

* Corresponding author: donnymrt123@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 11/06/2023

Revised 11/09/2023

Accepted 30/11/2023

Available online 30/11/2023

Keyword: Scalogram Analysis;
Gravity; Klassen Typology

JEL Classification
O10, O20

Copyright (c) 2023 Saputra,
M. D. & Hidayat, W.



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

Determining the center of economic growth is one of the government's regional development strategies to address inequality between regions, conditions in each region are different. The purpose of this research is to identify the center of economic growth in South Kalimantan Province, the analytical tools used are scalogram analysis, gravity analysis and Klassen typology. The data used in the scalographic analysis are social, economic and government facilities, the types of these facilities include data on social facilities in the form of educational facilities, health facilities and worship facilities. For data on economic facilities in the form of: markets, means of transportation (public transportation), small industries, stations and lodging, savings and loan cooperatives, KUD cooperatives. Government facilities in the form of: village office, sub-district office. The results show that the center of growth for South Kalimantan Province is Banjarmasin City and has close interactions with Banjar Regency, Banjarbaru City and Barito Kuala Regency as hinterland areas, Banjarmasin City is in quadrant two which is one of the developed but depressed areas.

Abstrak

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi ini salah satu strategi pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah untuk menangani ketimpangan antar wilayah, kondisi setiap daerah yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, alat analisis yang digunakan adalah analisis scalogram, analisis gravitasi dan tipologi kelas. Data yang digunakan pada analisis skalogram yaitu fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan, jenis-jenis fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya meliputi data fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan. Untuk data fasilitas ekonomi berupa: pasar, sarana angkutan (angkutan umum), industri kecil, stasiun

dan penginapan, koperasi simpan pinjam, koperasi KUD. Fasilitas pemerintahan yang berupa: kantor Desa, kantor Kelurahan. Hasil menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarmasin dan memiliki interaksi yang erat dengan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah hinterland, Kota Banjarmasin berada pada kuadran dua yang merupakan salah satu daerah daerah maju tapi tertekan.

PENDAHULUAN

Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Dilihat secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut. Kriteria pusat pertumbuhan yaitu sebagai daerah cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan dan memiliki interaksi ekonomi dengan daerah belakangnya (Sari, 2021)

Banyaknya permasalahan dan hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan akan memberatkan usaha pemerintah pusat jika tidak dibantu oleh pemerintah-pemerintah daerah yang lebih mengenal tentang daerahnya masing-masing. Seperti topografi, kelemahan maupun kurangnya kelengkapan fasilitas yang dimiliki dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Solusi untuk meningkatkan pembangunan secara serentak di daerah-daerah adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan menggali potensi yang ada, serta meningkatkan fasilitas yang belum mencukupi, diharapkan dapat mempercepat pembangunan. (Nandya, 2016)

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, masing-masing daerah mempunyai cara-cara tersendiri, begitupun dalam upaya penyediaan sarana penunjang hidup mereka. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman). Yang termasuk sarana dalam suatu daerah adalah sarana peribadahan, sarana perekonomian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dll. yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. (Utami, 2020)

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek antar susunan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman, peluang dan tantangan Persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah Disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah Dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal ini, maka Perlu upaya agar setiap kabupaten memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan kabupaten lain.(Darnilawati, 2018)

Salah satu cara yang dipakai untuk mempercepat pembangunan daerah adalah dengan menetapkan pusat pertumbuhan pada daerah tersebut. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan pembangunan. Dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi maka pembangunan akan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah sehingga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya (Utama, 2017)

Penentuan pusat pertumbuhan disuatu wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembangunan wilayah. Penentuan pusat pertumbuhan mempunyai fungsi untuk pemerataan pembangunan disemua wilayah, memudahkan koordinasi antar wilayah dan memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada (Sari, 2021).

Pemekaran wilayah yang dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, mempermudah pengawasan pembangunan serta membuka isolasi daerah-daerah pinggiran, sehingga akan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi penduduk. Jumlah kecamatan yang banyak juga dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan efektivitas pelayanan publik. Dengan terdistribusinya pemerintahan ke tingkat kecamatan, pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dan permasalahan yang spesifik dapat ditangani dengan lebih baik dan responsif. Adanya banyak kecamatan dalam suatu kabupaten dapat menjadi indikasi upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan membagi wilayah menjadi kecamatan-kecamatan yang lebih kecil, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih merata di berbagai bagian kabupaten tersebut, sehingga masyarakat di seluruh wilayah kabupaten dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi di pulau Kalimantan. Wilayah ini Memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan yang Berkaitan dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah melalui pendekatan pusat Pertumbuhan. Provinsi

Kalimantan Selatan dilalui oleh jalur jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi Potensi sektor Pertanian, Pertambangan, dan Industri.

Berkaitan dengan letaknya yang strategis dan luas wilayah yang dimiliki dengan Berbagai macam potensi sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing wilayah serta Berbagai corak perekonomian, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan berpotensi Untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu diperlukan Suatu kajian dan konsepsi perencanaan yang komprehensif dan matang dalam rangka Pengembangan wilayah sehingga Kalimantan Selatan dapat berkembang dengan Pesat serta mampu bersaing dengan Provinsi lainnya.

Wilayah luas dapat menjadi salah satu potensi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti potensi pengembangan infrastruktur, wilayah yang luas memberikan kesempatan untuk pengembangan infrastruktur yang lebih besar. Dengan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi yang baik, akses ke pelabuhan atau bandara, serta jaringan listrik dan telekomunikasi yang handal. Melalui sumber daya alamnya juga dapat menjadi potensi diversifikasi sektor ekonomi, setiap wilayah di dalam kabupaten dapat memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ekonomi yang beragam, seperti industri, pariwisata, pertanian, perikanan, energi, dan sektor lainnya. Diversifikasi sektor ekonomi dapat membuat lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan penduduk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wilayah yang berkembang akan lebih cepat menjadi pusat pertumbuhan, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain yang berada di daerah sekitarnya. Semakin lama akan menyebar ke berbagai wilayah dan menyerap potensi-potensi daerah sekitarnya. Adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kehidupan manusia terutama dalam meningkatkan kesejahteraan Penyesuaian ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, konsep pendekatan yang sering digunakan adalah konsep wilayah pengembangan daerah-daerah administratif. daerah kabupaten pada tiap kabupaten dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan selain itu juga pendekatan ruang lingkup kecamatan dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar Kabupaten dapat lebih merata.(Karmila & Rabiana Risma, 2022)

Pusat-pusat pertumbuhan tersebut, diharapkan daerah sekitarnya juga ikut terpengaruh dan termotivasi untuk maju. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis skalogram untuk menentukan pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan ketersediaan infrastruktur pemerintah, sosial, dan ekonomi serta analisis gravitasi untuk

menentukan seberapa diinginkan suatu lokasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah relatif terhadap lokasi lainnya. Distrik Gido, Distrik Idanogawo, dan Distrik Botomuzoi adalah tiga distrik di Kabupaten Nias yang paling berkembang menurut hasil analisis (Gulo, 2015)

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah untuk menangani ketimpangan antar wilayah, kondisi setiap daerah yang berbeda dapat dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologinya (Fudhail et al., 2021). Konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh konsep ruang ekonomi (economic space) yang dikemukakan oleh Francois Perroux. Perroux menyatakan bahwa, pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dengan akibat yang berbeda pula, dampak yang terjadi dengan adanya pengembangan ekonomi melalui penentuan pusat pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah lain. Hal ini dikarenakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya spread effect ke daerah sekitarnya sehingga daerah tersebut juga akan tumbuh dan berkembang perekonomiannya (Optari, 2021).

Menurut Tarigan dalam (Utami, 2020) suatu wilayah bisa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memenuhi 4 ciri yaitu Memiliki hubungan internal yang bersumber dari berbagai jenis aktivitas yang mempunyai nilai ekonomi, Memiliki efek pengganda (multiplier effect), Memiliki konsentrasi geografis, dan Bersifat mendorong wilayah belakangnya. Salah satu kriteria untuk menentukan berlangsungnya pembangunan ekonomi di suatu wilayah dan tanda keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dalam (Hariyanti, 2022) Untuk mencapai kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi memerlukan perpindahan dari tingkat ekonomi dasar ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Namun pada kenyataannya, permasalahan sering terjadi karena kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah tidak sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Karena keragaman, suatu tempat seringkali memiliki potensi yang berbeda dari tempat lain.

Menurut (Gulo, 2015) pertumbuhan ekonomi adalah cara yang berbeda untuk mendorong pembangunan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi difokuskan pada daerah yang memiliki potensi dan infrastruktur lokal, maka akan mempercepat pembangunan daerah karena secara tidak langsung akan mendorong penduduk untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Perroux dalam (Emalia & Farida, 2018), Ada dua cara untuk menginterpretasikan suatu pusat perkembangan (growth pole) yaitu secara fungsional dan geografis.

Teori tempat sentral merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa daerah-daerah nodal itu mempunyai hirarki. Tidak semua daerah bersifat homogenitas

tetapi terdapat perbedaan baik dalam persebaran penduduk maupun luas wilayahnya (Irfanti, 2019). Oleh karena itu, Menurut Perroux sangat penting mengetahui tingkat hirarki suatu daerah sehingga dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut. Suatu pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula seperti Perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif dan pasif (Halwan, 2022).

Menurut Tarigan dalam (Ermawati, 2010) Lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun yang ada dibawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya. Menurut Alferd Webber dan August Lost dalam (Irfanti, 2019) Teori lokasi telah lama di perkenalkan oleh ahli ekonomi, dimana pada waktu itu implikasi secara teoritis menunjukkan bahwa faktor tata ruang dan faktor jarak nampak sekunder atau secara implikasi dibandingkan dengan unsur waktu dalam menganalisis ekonomi. Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tata ruang kegiatan ekonomi atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau 13 kegiatan lain. Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti bahan baku lokal, permintaan lokal, bahan baku yang dapat dipindahkan, dan juga permintaan dari luar.

Perbedaan Penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang pusat pertumbuhan menggunakan analisis scalogram dan analisis gravitasi, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga metode analisis yaitu analisis scalogram, analisis gravitasi dan tipologi klassen hal ini mendorong untuk mengetahui gambaran tentang pola struktur pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik analisis data yaitu Klassen Typology, Interaction or Gravity Analysis, dan Scalogram Analsysi. Dalam kajian ini, ketersediaan fasilitas milik publik dimanfaatkan untuk menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan hirarki wilayah, beserta analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas. Untuk menentukan seberapa banyak kontak antara pusat-pusat pengembangan dan kabupaten pendukung (hinterland), digunakan analisis interaksi atau gravitasi. Status ekonomi setiap provinsi Kalimantan Selatan dinilai dengan menggunakan tipologi Klassen.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas ini dapat menunjukkan bahwa daerah yang berhierarki tinggi adalah kabupaten yang memiliki sejumlah fungsi dan fasilitas dan nilai indeks sentralitas dengan kategori

peningkatan tinggi, atau kabupaten yang dapat digabungkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan daerah yang hirarkinya paling rendah ditentukan oleh jenis fungsi dan fasilitas yang lebih sedikit serta nilai indeks sentralitas yang lebih rendah. Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima kelas/kategori dengan pembagian sebagai berikut:

- Kabupaten Hirarki I dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas sangat tinggi.
- Kabupaten Hirarki II dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas tinggi.
- Kabupaten Hirarki III dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas sedang.
- Kabupaten Hirarki IV dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas rendah.
- Kabupaten Hirarki V dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas sangat rendah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram yang menggabungkan analisis indeks sentralitas dengan teknik pembobotan untuk mengidentifikasi wilayah dengan perkembangan ekonomi tertinggi. Alat analisis indeks sentralitas ini memiliki tujuan yang sama dengan analisis skalogram, yaitu menentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung jumlah fungsi, jenis fungsi, dan ukuran struktur frekuensi masing-masing fungsi dalam satu satuan luas. dalam (Ermawati, 2010).

Berikut ini dalam penelitian cara/langkah-langkah dalam analisis skalogram dengan indeks sentralitas:

- a. Kolom (1 dan 2) diisi dengan nomor urut untuk wilayah (kabupaten) dan nama-nama kabupaten yang ada di provinsi terkait.
- b. Kolom selanjutnya adalah kolom yang diisi dengan jenis fungsi (jenis fasilitas). Pengisian kolom jenis fungsi diisi dengan nilai 1 jika ada fasilitas tersebut di suatu wilayah atau 0 jika tidak ada fasilitas yang dimaksud di suatu wilayah.
- c. Kolom "Jumlah Jenis Fungsi/Fasilitas" diisi dengan menjumlahkan masing-masing fungsi yang ada pada setiap kabupaten (setiap baris).
- d. Pada baris "Total Fungsi" diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada dari seluruh Kabupaten (setiap kolom)
- e. Pada baris "Sentralitas Total", pada setiap kolom/baris memiliki nilai yang sama, yaitu 100

Pada baris terakhir (nilai bobot), dihitung nilai bobot yang berdasarkan pada nilai total sentralitas dibagi dengan jumlah fungsi masing-masing kolom. Rumus Indeks sentralitas.

$$C = t/T \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

C = Bobot Fungsi

t = nilai sentralitas total, yaitu 100

T = Jumlah total fungsi Indeks sentralitas ($IS = \sum C$)

Angka nilai bobot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, akan semakin kecil nilai bobotnya, semakin rendah frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin tinggi bobotnya.

- f. Langkah selanjutnya adalah mengalikan nilai bobot fasilitas dengan nilai fungsi fasilitas setiap kabupaten (setiap kolom)
- g. Setelah langkah (poin 6) selesai, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai bobot dari berbagai jenis fungsi setiap kabupaten (berdasarkan baris/horizontal). Penjumlahan tersebut akan menghasilkan nilai indeks sentralitas.
- h. Dari nilai indeks sentralitas tersebut kemudian akan ditentukan hirarki pusat pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas ini dapat menunjukkan bahwa daerah yang berhierarki tinggi adalah kabupaten yang memiliki jumlah jenis/fasilitas dan nilai indeks sentralitas yang tinggi, atau kabupaten yang dapat digabungkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Area yang berada pada hirarki terendah ditentukan oleh jumlah jenis fungsi/fasilitas yang lebih sedikit dan nilai indeks sentralitas yang lebih rendah.

Jumlah perjalanan yang dilakukan warga dari kota A ke kota B atau sebaliknya dapat digunakan untuk mengukur interaksi. Pertama, ukuran kedua kota/daerah yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk, jumlah lapangan kerja, pendapatan total (nilai tambah), jumlah dan ukuran bangunan, jumlah fasilitas kepentingan umum, dll., menentukan seberapa banyak kontak yang akan terjadi antara kedua wilayah tersebut. Populasi adalah salah satu dari banyak alat ukur yang sering digunakan. Ini karena data populasi dapat diakses dan karena terkait erat dengan berbagai pengukuran lain yang disebutkan di atas. Jarak antara kota A dan B merupakan elemen kedua yang berdampak pada interaksi ini. Keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan dipengaruhi oleh jarak karena dibutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Rumus Gravitasi secara umum adalah sebagai berikut :

$$I_{ij=k} = \frac{P_i P_j}{d_{ij}^k} \dots \dots \dots (2)$$

Selanjutnya penggunaan rumus gravitasi tersebut dapat disederhanakan menjadi :

$$I = \frac{P_1 \times P_2}{d^2} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

I = Besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B

P_1 = Jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa)

P_2 = Jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa)

d_{ij} = Jarak antara kota I dan kota j (Km)

k = Bilangan konstanta berdasarkan pengalaman

$b =$ Pangkat dari $ij d$ yang sering digunakan $b = 2$

Semakin banyak keterkaitan antara daerah yang merupakan tempat pertumbuhan ekonomi dengan sekitarnya, maka semakin dekat pula hubungan antara daerah pedalaman dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

Gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau kawasan relatif terhadap perekonomian di atas dapat diperoleh dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/wilayah dan pendapatan per kapita suatu wilayah/wilayah merupakan variabel yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi ;

a. Daerah Maju dan Cepat Tumbuh

Daerah ini memiliki tingkat PDRB Per kapita dan laju pertumbuhan yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah referensi.

b. Daerah Maju Tapi Tertekan

Daerah ini memiliki tingkat PDRB Per Kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah referensinya, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih kecil dari pada wilayah referensinya.

c. Daerah Relatif Tertinggal

Daerah ini memiliki tingkat PDRB Per Kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan wilayah referensinya.

d. Daerah Berkembang Cepat

Daerah ini memiliki tingkat PDRB Per Kapita lebih kecil dibandingkan dengan wilayah referensinya, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih besar dari pada wilayah referensinya.

Ketiga metode ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder bisa dapat dari beberapa sumber, dalam penelitian ini peneliti dapat mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik, instansi-instansi terkait jurnal, buku, laporan ataupun dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penentuan pusat pertumbuhan. (Lesatari & Jafra, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa data yang digunakan untuk analisis skalogram dalam penelitian ini berjumlah 22 jenis fungsi/fasilitas yang meliputi data fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan. Jenis-jenis fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya, meliputi data fasilitas sosial berupa: fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan. Untuk data fasilitas ekonomi berupa: pasar, sarana angkutan (angkutan umum), industri kecil, stasiun dan penginapan, koperasi simpan pinjam, koperasi KUD. Fasilitas pemerintahan yang berupa: kantor Desa, kantor Kelurahan.

Tabel 1. Hirarki Ketersediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan tiap Kabupaten/kota Pada Tahun 2021 Menggunakan Analisis Skalogram.

KABUPATEN	ANALISIS SKALOGRAM	
	Indek Semtralitas	Hirarki
Kota Banjarmasin	454,5	Hirarki I
Kotabaru	240,3	Hirarki III
Tanah Laut	231,8	Hirarki IV
Tanah Bumbu	221,5	Hirarki IV
Banjar	204,6	Hirarki IV
Tabalong	197,4	Hirarki IV
Kota Banjarbaru	182,7	Hirarki IV
Hulu Sungai Selata	140,5	Hirarki V
Barito Kuala	131,8	Hirarki V
Balangan	124,5	Hirarki V
Hulu Sungai Tengah	103,2	Hirarki V
Hulu Sungai Utara	86,8	Hirarki V
Tapin	80,4	Hirarki V

Hasil Analisis Scalogram mengidentifikasi pusat pelayanan yang ada di Kalimantan Selatan meliputi 1 kabupaten/kota kategori hirarki I, 1 kabupaten/kota kategori hirarki III, 5 kabupaten/kota kategori hirarki IV, 6 kabupaten/kota kategori hirarki V.

Kota Banjarmasin merupakan pemilik wilayah pada Hirarki I yang memiliki bobot total 454,5. Status kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan erat kaitannya dengan pemilihannya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Akibatnya, banyak bermunculan usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha perdagangan dan jasa, perindustrian, dan berbagai proyek pembangunan berbagai jenis sarana ekonomi, termasuk pasar, jasa transportasi, dan lain sebagainya, hadir di kabupaten atau kota ini.

Jumlah penduduk sebesar 662.320 pada tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki konsentrasi penduduk yang paling tinggi diantara kabupaten dan kota lainnya. Karena banyaknya penduduk yang tinggal di kabupaten/kota ini, maka kebutuhan akan pelayanan sosial yang tinggi menyebabkan dibangunnya beberapa bangunan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan di daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan Kota Banjarmasin memiliki jumlah fasilitas sosial yang cukup besar, total 949 unit, menjadikannya sebagai salah satu kabupaten/kota dengan jumlah fasilitas sosial terbesar. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan untuk mempromosikan pengembangan tempat-tempat lain di wilayah tersebut, kabupaten dan kota ini dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang signifikan.

Kriteria penilaian yang digunakan untuk menetapkan tingkat/hierarki pusat-pusat pertumbuhan didasarkan pada evaluasi nilai indeks sentralitas yang dimiliki dan sejauh mana tersedianya fasilitas publik. Untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah, terutama

pada daerah dengan pertumbuhan dan pembangunan yang lemah, pembangunan wilayah melalui konsep pusat-pusat pertumbuhan harus dilakukan secara hierarkis/berjenjang. Akibatnya, pusat-pusat pertumbuhan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dapat digunakan untuk membedakan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dalam skala regional.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode interaksi atau gravitasi dengan menggunakan variabel jumlah penduduk dan kecamatan, dapat diketahui bagaimana masing-masing kota berinteraksi dengan kota sekitarnya (hinterland). Berikut hasil perhitungan interaksi menggunakan metode interaksi atau gravitasi tabel 4.7.

Tabel 2. Hasil Interaksi Kabupaten/kota Pusat Pertumbuhan dengan Kabupaten/kota sekitarnya (hinterland-nya)

KABUPATEN/KOTA	ANALISIS GRAVITASI		
	Jumlah Penduduk	Jarak (km)	Interaksi
Tanah Laut	354340	65	47895197,71
Kota Baru	329483	305	1956176,10
Banjar	572109	40	214806821,36
Barito Kuala	316963	45	131206833,85
Tapin	191801	113	8676568,43
Hulu Sungai Selatan	229960	135	1997642,68
Hulu Sungai Tengah	260754	165	5101092,55
Hulu Sungai Utara	228831	130	4242864,08
Tabalong	256903	232	2369013,07
Tanah Bumbu	328146	262	4370440,96
Balangan	132213	202	1760890,31
Kota Banjarbaru	258753	35	139899826,09

Dari hasil perhitungan angka interaksi pusat pertumbuhan terhadap masing-masing kabupaten, Dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa Kota Banjarmasin memiliki nilai Interaksi dengan Kabupaten Tanah Laut sebesar 47895197,71 , Kabupaten Kota baru sebesar 1956176,10 , Kabupaten Banjar senilai 214806821,36 , Kabupaten Barito Kuala sebesar 131206833,85 , Kabupaten Tapin sebesar 8676568,43 , Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 1997642,68 , Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 5101092,55 , Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 4242864,08 , Kabupaten Tabalong sebesar 2369013,07 , Kabupaten Tanah Bumbu Sebesar 4370440,96 , Kabupaten Balangan sebesar 1760890,31 , Kota Banjarbaru sebesar 139899826,09 .

Kabupaten/kota Pusat Pertumbuhan Kalsel dan Kabupaten Banjar yang merupakan daerah pedalaman paling sering berinteraksi. Hal ini terlihat dari banyaknya kontak antara Kabupaten Banjar dengan pusat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis Tipologi Klassen keseluruhan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Satu kecamatan yaitu Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan berada pada kuadran I (Daerah Maju dan Tumbuh Cepat) berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen untuk masing-masing kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Penentuan Kuadran pada tiap Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

TIPOLOGI KLASSEN	$x_i \leq x$	$x_i \geq x$
$\Delta x_i \geq \Delta x$	II Kab. Hulu Sungai Selatan	I Kab. Tanah Bumbu
	III	IV
	- Kab. Tanah Laut	- Kab. Kotabaru
	- Kab. Banjar	- Kab. Tapin
$\Delta x_i \leq \Delta x$	- Kab. Barito Kuala	- Kab. Tabalong
	- Kab. Hulu Sungai Tengah	- Kab. Balangan
	- Kab. Hulu Sungai Utara	- Kota Banjarmasin
	- Kota Banjarbaru	

Kabupaten/kota rata-rata berada pada kuadran III (Daerah Relatif Tertinggal) yang berarti PDRB per kapitanya lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan pertumbuhan ekonominya lebih lambat dari Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV (Daerah Berkembang Pesat) memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin adalah beberapa kabupaten/kota tersebut.

Hanya dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terbagi dalam kuadran I dan II. Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kuadran I (Daerah Maju dan Berkembang Cepat) yang menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan dan rata-rata pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kuadran II (Developed but Depressed Area), rata-rata pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan, namun PDRB per kapitanya lebih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kondisi ekonomi yang lebih maju dan berkembang dengan cepat dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini mungkin memiliki sektor-sektor ekonomi yang kuat dan berhasil menarik investasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Banjarmasin menjadi titik fokus bagi investasi dan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya status Kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perhatian khusus dapat diberikan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.

Kota Banjarmasin memang merupakan tempat konsentrasi penduduk yang memiliki jumlah penduduk yang signifikan, mencapai 684,54 ribu jiwa pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang besar ini, kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana peribadatan juga semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kota Banjarmasin telah membangun berbagai fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan tempat ibadah. Fasilitas pendidikan yang tersedia meliputi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, terdapat rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, Kota Banjarmasin juga memiliki wilayah hinterland yang cukup besar, yang meliputi wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala. Wilayah hinterland ini berperan penting dalam mendukung perkembangan Kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Interaksi dan hubungan antara Kota Banjarmasin dengan wilayah sekitarnya sangat erat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Dengan adanya fasilitas sosial yang memadai dan wilayah hinterland yang luas, Kota Banjarmasin dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi penduduk di wilayahnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini menjadi penting dalam pengembangan wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kota Banjarmasin memang diakui sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori daerah cepat berkembang, klasifikasi ini didukung dengan ekonomi wilayah ini masuk dalam kategori ke empat melalui analisis tipologi kelas. Nilai indeks sentralitas yang tinggi menunjukkan peran penting Kota Banjarmasin dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Kabupaten Banjar merupakan daerah yang memiliki hubungan yang kuat dengan pusat pertumbuhan sebagai daerah hinterland yang nilainya paling tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya, Interaksi ini melibatkan pergerakan manusia, barang, dan uang antara keduanya, dan menunjukkan hubungan yang erat dalam hal ekonomi dan sosial. Provinsi Kalimantan Selatan perlu pemerataan penyediaan fasilitas khusus pada daerah yang memiliki hirarki cukup rendah serta lebih membutuhkan fasilitas yang beragam secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Darnilawati. (2018). Strategi Kutup Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 6(1), 1–8.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 61–74. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Ermawati. (2010). *Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah* [Universitas Sebelas Maret Surakarta].
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/12513/MjcwNjk=/Analisis-pusat-pertumbuhan-ekonomi-pada-tingkat-kecamatan-di-Kabupaten-Karanganyar-Provinsi-Jawa-Tengah-abstrak.pdf>
- Fudhail, I., Sambodo, H., & Purnomo, S. D. (2021). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 43–52.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.217>
- Gulo, Y. (2015). Growth Center Identification and Its Supporting Area in Nias Regency Regional Development. *Jurnal Widyariset*, 18(1), 37–48.
<https://core.ac.uk/download/pdf/304736659.pdf>
- Halwan, S. M. (2022). *Analisis Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat*. Unstitut Teknologi Nasional Bandung.
- Hariyanti, E. (2022). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Sektor Ekonomi Unggulan di Kawasan Wanarakuti. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i1.4362>
- Irfanti, P. E. (2019). *Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Dalam Pengembangan Provinsi Jawa Timur*. Universitas Jember.
- Karmila, & Rabiana Risma, O. (2022). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1739–1745.
- Lesatari, P., & Jafra, R. A. (2022). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah di Kecamatan Kuantan Mudik. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi Dan Komuter*, 5(2), 145–153.

- Nandya, A. (2016). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Sleman. In *Jurnal dspace UII*. Universitas Islam Indonesia.
- Optari, L. K. (2021). Analisis Interaksi Spasial Terhadap Penentuan Pusat Pertumbuhan Pada Pengembangan Wilayah Kabupaten Asahan. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, Vol. 4 No. 1*, 512–521. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/144>
- Sari, M. (2021). *Kajian Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Utama, A. W. Y. (2017). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Indonesia.
- Utami, S. P. (2020). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Magetan. In *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJ A_PRINT.docx* (Vol. 21, Issue 1). Universitas Islam Indonesia.